

# SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DI MADRASAH MU'ALIMAT MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Dimas Feryawan<sup>1</sup>, Zhafira An Nabila<sup>2</sup>, Sambudi<sup>3</sup>  
Universitas Ahmad Dahlan  
dimas1900031014@webmail.uad.ac.id

## Abstract

*This study aims to describe how the financial management system in the Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta madrasa. This research uses descriptive qualitative research method. The results of this study indicate that the financial management system at Madrasah Mu'alimat Yogyakarta uses a one-year budget plan called RAPBM (Madrasah Revenue and Expenditure Budget Plan). Financial management in Madrasah Mu'alimat is divided into two parts; The first is taking care of all incoming finances, and the second is managing the various expenses needed for the madrasa. The financial system at Madrasah Mu'alimat is evaluated at the end of every month and regularly every month. This evaluation explains the amount of budget money, expenses and income. Therefore, the management system at the Mu'alimat madrasa must be transparent and accountable in carrying out madrasa financial reports.*

**Keywords :** *Managemen, Madrasah Finance*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sistem manajemen keuangan di madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen keuangan di madrasah Mu'alimat Yogyakarta menggunakan perencanaan anggaran satu tahun yang disebut dengan RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah). Pengelolaan keuangan di Madrasah Mu'alimat terbagi menjadi dua bagian; pertama mengurus semua keuangan yang masuk, dan kedua yaitu mengatur berbagai pengeluaran dibutuhkan bagi madrasah. Sistem keuangan di Madrasah Mu'alimat diadakan evaluasi di setiap akhir bulannya dan rutin tiap bulan. Dalam evaluasi ini dijelaskan terkait jumlah uang anggaran, pengeluaran dan pemasukan. Maka dari itu sistem pengelolaan di madrasah Mu'alimat harus transparan dan akuntabel dalam melakukan laporan keuangan madrasah.

**Kata Kunci :** Manajemen, Keuangan Madrasah

## PENDAHULUAN

Dunia pendidikan merupakan salah satu poin penting dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Suatu bangsa bisa dikatakan berhasil dalam mewujudkan cita-citanya dapat dilihat dari jumlah banyaknya warga negara yang terdidik. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas itu sudah cukup menjadi kunci keberhasilan dalam membangun sebuah negara. Dengan kata lain, pendidikan dapat menjadi penentu masa depan suatu bangsa, karena dengan adanya kemajuan di bidang teknologi saat ini sangat berpengaruh dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Setiap diri manusia pasti dihadapkan pada proses pendidikan, karena hal itu menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara agar memperoleh pendidikan yang selengkap-lengkapnya. Hal itu sesuai dengan UU RI no. 20 tahun 2003 pasal 5 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”<sup>1</sup>

Pendidikan sudah seperti kebutuhan dasar bagi setiap insan manusia yang diharapkan agar manusia dapat menjadi manusia yang seutuhnya dengan dibekali berbagai pengetahuan dan keilmuan yang diharapkan dapat merubah sifat, kepribadian, pemikiran dan tingkah laku kearah yang lebih baik.

Peran pemerintah dalam membantu menjalankan pendidikan tercermin dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 31 ayat 3 amandemen keempat menyebutkan bahwa “Negara mengutamakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional.”<sup>2</sup> Dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa pemerintah siap bertanggungjawab demi membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional (Dewi, 2014).

Peran dari ortonomi daerah berdasarkan desentralisasi diharapkan dapat menciptakan sikap demokrasi, keadilan dan efisiensi terutama dalam dunia

---

<sup>1</sup>Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), bab IV Pasal 5.

<sup>2</sup> Undang-Undang RI.No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), bab II Pasal 3.

pendidikan. Pemerintah memberikan wewenang yang luas kepada kepala sekolah dalam melaksanakan manajemen sekolah secara mandiri demi meningkatkan mutu dalam sekolah. Dalam wujud ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Desentralisasi pendidikan mencakup suatu proses pemberian wewenang yang lebih luas dalam bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaan, dengan melalui proses dari pemerintah pusat ke lokal, yang bersamaan dengan diberikannya wewenang yang lebih besar dan sesuai pada tingkat sekolah. Dengan diberlakukan sistem desentralisasi sekolah, diharapkan sekolah dapat memanfaatkan serta menggunakan potensi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas sekolah.

Otonomi diibarkan agar sekolah lebih leluasa mengolah sumber daya, dana maupun belajar sehingga dapat mengalokasikannya sesuai kebutuhan setempat. Termasuk dalam hal mengelola manajemen keuangan sekolah, sekolah memiliki wewenang yang luas dalam memanfaatkan dan mengelola sumber dana sesuai kebutuhan sekolah dengan bijaksana, transparan dan akuntabel.

Dalam penyelenggaraan suatu pendidikan, keuangan merupakan salah satu hal yang sangat menentukan, karena terdapat beberapa komponen keuangan sekolah yang dapat menentukan terlaksananya beberapa kegiatan dalam proses pembelajaran di sekolah, tentunya bersama komponen lainnya. Sehingga diperlukan sistem manajemen keuangan yang terstruktur (Kuwanti, 2018).

Manajemen keuangan dalam pendidikan memberikan perhatian yang besar tentang pentingnya pengelolaan keuangan pendidikan dalam meningkatkan program sekolah, pelaksanaan guru dalam pembelajaran, ataupun dalam proses akademis peserta didik. Kepala Sekolah sebagai perencana anggaran harus memahami sistem pengelolaan dan pemanfaatan kebutuhan sekolah, maka dari itu seorang Kepala Sekolah diharuskan memiliki ilmu tentang manajemen keuangan yang baik, agar mudah menjalankan semua kegiatan di sekolah namun tidak terlepas dari pengelolaan dana. Karena sebesar apapun dana yang diberikan oleh pemerintah, apabila tidak dikelola dengan benar, maka sekolah tersebut akan mengalami kemerosotan.

Manajemen keuangan harus ditangani oleh ahlinya, jika tidak takutnya akan membuat rugi pihak sekolah. Sebab manajemen yang efisien akan mempengaruhi keuntungan bagi lembaga pendidikan sekolah (Komariah, 2018). Ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengatur manajemen keuangan di sekolah, yaitu meliputi prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Sekolah juga memiliki beberapa pengaturan yang berkaitan tentang penggunaan dana anggaran sekolah yang akan digunakan demi menjalankan roda pendidikan di lingkungan sekolah, baik sekolah swasta ataupun negeri.

Fakta yang ada di lapangan, menunjukkan bahwa sekolah diperlukan adanya manajemen keuangan, terutama dalam mengatur tata kelola upah guru (pendidik) dan tenaga kependidikan, tenaga tata usaha, atau untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, maka pemerintah membantu dengan memberikan bantuan berupa Bantuk Operasional Sekolah (BOS) (Subkhi, 2017). Bantuan ini diberikan kepada satuan pendidikan di lembaga sekolah/madrasah guna membantu membiayai peserta didik agar mampu menunjang sarana dan prasarana dalam pendidikan, pemeliharaan dan perbaikan sekolah, ataupun untuk biaya ulangan dan upah guru honorer (Pusvitasari, 2021)

Dalam penelitian ini menegaskan bahwa manajemen keuangan dalam mengatasi sarana dan prasarana harus dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan pengadaan, penyimpangan, investasi masa depan, pemeliharaan, pemanfaatan maupun pengawasan. Penelitian ini dibuat dalam rangka memahami dan menganalisis tentang bagaimana sistem manajemen sekolah/madrasah yang dilakukan oleh pihak sekolah di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang dilakukan di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta dengan subjek penelitian yaitu kepala sekolah, guru kelas, dan guru bagian keuangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik pengumpulan data. Sedangkan penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu metode wawancara, observasi, dan metode studi dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia pendidikan terdapat beberapa tujuan yang dapat membuat suatu lembaga pendidikan tersebut bisa lebih maju dan berkembang. Di dalam peraturan pemertintah sudah tertulis bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu standar yang sudah di tentukan di setiap lembaga pendidikan oleh pemerintah indonesia. Dalam lembaga pendidikan sistem keungan merupakan sistem yang sangat penting karena sistem inilah yang mengatur segala pembiayaan dan keuangan, yang meliputi tiga hal : yang pertama Ekonomi Pendidikan yang mempunyai sangkut paut dengan apa yang di keluarkan oleh masyarakat. Kedua, keuangan sekolah yang bersngkutan terhadap beberapa kebijakan yang ada didalam lingkup sekolah untuk memberikan pengertian kepada peserta didik. Ketiga, pajak yang ada dalam administrasi bisnis yang dimiliki oleh sekolah harus disusun dengan baik sehingga dapat dikaitkan dengan beberapa tujuan kebijakan di sekolah tersebut.

Di karenakan Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, merupakan madrasah yang berlembaga pendidikan swasta, maka madrasah tersebut mempunyai perencanaan anggaran dalam satu tahun, kalau dalam Madrasah Muallimat disebut dengan RAPBM (Rencanan Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah) anggaran inilah yang dipraktekan didalam lingkungan madrasah tersebut. Lembaga pendidikan swasta khususnya Madrasah Muallimat, mendapat masukan anggaran keuangan dari beberapa sektor, mulai dari para peserta didik, dunatur, pemerintah seperti dana BOS itu dimasukan kedalam anggran madrasah tersebut. Managemen keuangan seperti inilah yang diterapkan oleh Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta.

Cara mengelola keuangan sekolah dengan baik dan sistematis yang diterapkan oleh madrasah Muallimin dan Muallimat itu sama, dikarenakan dalam naungan yang sama. Yakni di bawah pimpinan Muhammadiyah, badan pembina harian madrasah muallimat dan Madrasah muallimin itu berada dibawah naungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengelolaan keuangan di madrasah muallimat itu di bagi menjadi dua bagian; pertama mengurus semua keuangan yang masuk, dan kedua yaitu mengatur berbagai pengeluaran yang dibutuhkan oleh madrasah (Nurhidayah, 2019).

Jadi dari dua bendahara keuangan madrasah akan tertata rapi karena sudah terkordinasi sendiri uang yang masuk dan uang yang keluar. Bendahara yang

mengurusi uang masuk tidak bisa ikut campur tangan dengan uang yang keluar akibat di gunakan oleh madrasah begitupun sebaliknya, karena sudah terfokuskan dalam bagianya masing-masing. Dalam sistem keuangan setiap bagian-bagiannya harus menggunakan sifat transparan dan akuntabel, dalam melakukan laporan keuangan ke madrasah. Ada dua bendahara yang membantu sistem keuangan di madrasah yakni bendahara masuk dan bendahara keluar. Ketika bendahara keluar ingin menggunakan keuangan dalam kegiatan, staff harus menggunakan laporan kegiatan madrasah yang membutuhkan keuangan agar sistem keuangan tetap berjalan dengan baik dan tidak merusak sistem dan semua proses ini harus diketahui oleh badan pembina sebagai pengawas harian. Dalam pengajuan ini harus sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tertulis bahwa semua program kegiatan dan keuangan yang di ajukan dan akan diadakan sudah tertulis di RAB tersebut.

Dan di Madrasah Muallimat sendiri mempunyai beberapa staf yang terdiri dari satu direktur sebagai pemimpin, kemudian wadir satu yang bertugas sebagai pengajaran dan kurikulum, wadir dua bertugas sebagai ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan, wadir tiga bertugas sebagai kesiswaan, dan wadir empat bagian kepesantreanan. Dan di setiap wadir sudah mempunyai beberapa anggota dalam membantu berjalanya program kegiatan masing-masing setiap wadir. Dalam sistem keuangan di Madrasah Muallimat selalu diadakan evaluasi disetiap akhir bulanya dan itu dilakukan disetiap bulan. Dalam evaluasi ini harus dijelaskan bahwa jumlah uang yang dianggarkan dan uang yang sudah dikeluarkan dan digunakan dalam kebutuhan madrasah. Dalam evaluasi ini, setiap uang yang sudah dianggarkan harus dipertanggung jawabkan untuk kegiatan apa saja dalam satu bulan tersebut.

Maka dari itu sistem pengelolaan keuangan yang ada di Madrasah Muallimat harus transparan dan akuntabel karena kami juga pembinaannya dari badan Pembina waktu itu dan kami juga sering ada audit keuangan setiap 5 tahun sekali dalam mu'tamar, dan setiap bulanya membuat laporan ke pimpinan dan dalam 1 tahun kita harus bawa laporan ke BPH. Ketika kegiatan ini sudah diterapkan dalam sistem keuangan akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penggunaan keuangan dalam madrasah Muallimat. Dan perlu diketahuai bahwa segala sesuatu yang berurusan dengan uang itu sangat rumit dan harus benar, jadi setiap staf ataupun

karyawan yang menerima amanah dalam mengelola keuangan harus berfokus dalam sistem keuangan tersebut tanpa diikuti sertakan dalam kepengurusan lainnya, supaya terfokus dalam sistem keuangan di madrasah, ucap staff keuangan madrasah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas yaitu bahwasannya penting sekali mengetahui bagaimana sistem pengelolaan manajemen uang secara sistematis dan akuntabel. Suatu lembaga sekolah tidak akan berkembang pesat jika sistem pengelolaan keuangannya tidak tersusun dengan sistematis, karena di Madrasah Muallimat sendiri menggunakan sistem Perencanaan Anggaran dalam satu tahun biasanya disebut dengan RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah). Dan di Madrasah Muallimat sendiri mempunyai beberapa staf yang terdiri dari satu direktur sebagai pemimpin, kemudian wadir satu yang bertugas sebagai pengajaran dan kurikulum, wadir dua bertugas sebagai ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan, wadir tiga bertugas sebagai kesiswaan, dan wadir empat kepesantreanan. Dan di setiap wadir sudah mempunyai beberapa anggota dalam membantu berjalanya program kegiatan masing-masing setiap wadir. Dan pada sistem pengelolaan keuangan di Madrasah Muallimat selalu diadakan evaluasi dengan pimpinan disetiap akhir bulanya dan itu dilakukan disetiap bulan.

Sarannya seluruh lembaga sekolah dapat mencontoh sistem pengelolaan manajemen keuangannya yang ada di Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, dikarenakan ada dua bendahara khusus untuk pengelola yaitu bendahara pemasukan dan bendahara pengeluaran. Jadi bendahara pemasukan hanya fokus dengan pengelolaan uang masuk dari bagian staff yang memiliki program kerja, begitu juga bendahara pengeluaran hanya fokus dengan pengelolaan uang keluar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, A. (2014). *Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah.
- Komariah, N. (2018). *Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan*, 67-93.

- Kuwanti, A. E. (2018). *Pelaksanaan Manajemen Keuangan di Madrasah Ibtidaiyah Al Khoiriyah 1 Semarang Tahun Pembelajaran 2017/2018*. Semarang: Walisongo Institutional Repository.
- Pusvitasari, R. d. (2021). *Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi kasus di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo)*, 1-13.
- Subkhi, W. (2017). Manajemen Pendidikan. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kemasan I Surakarta*, 1-8.
- Niati, A., Suhardjo, Y., Wijayanti, R., & Hanifah, R. U. (2019). Pelatihan Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pesantren bagi Pengelola Yayasan Pondok Pesantren X di Kota Semarang. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(1), 76. <https://doi.org/10.26714/jsm.2.1.2019.76-79>
- Nurhidayah, N. (2019). Penganggaran Keuangan Madrasah. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 4(1), 133–146. <https://doi.org/10.15575/isema.v4i1.5646>